

**ANALISIS PENGARUH SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA
KERJA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana



ISMAIL

B1013161025

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2021**

**ANALISIS PENGARUH SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA
KERJA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH

ISMAIL

B1013161025

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2021**

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Ismail
NIM	:	B1013161025
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi	:	Ekonomi Publik
Judul Skripsi	:	Analisis Pengaruh Sektor Industri Pengolahan dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Tahun 2016 (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan gelar kesarjanaan di Universitas Tanjungpura.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 28 Juni 2021

Ismail
NIM. B1013161025

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Ismail
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi	:	Analisis Pengaruh Sektor Industri Pengolahan dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019
Tanggal Ujian	:	4 Agustus 2021

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bertanggungjawab atas apa yang telah saya tulis.

Pontianak, 28 Juni 2021

Ismail
NIM. B1013161025

LEMBAR YURIDIS

Analisis Pengaruh Sektor Industri Pengolahan dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

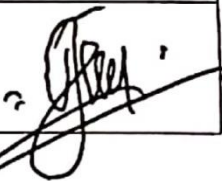
Penanggung Jawab Yuridis



Ismail
B1013161025

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 4 Agustus 2021

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1	Ketua Penguji	Dr. Jumhur, S.E., M.Si.	4-11-2021	
		NIP. 196709281997021001		
2	Penguji 1	Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si.	09 Okt. 2021	
		NIP. 196312091989031004		
3	Penguji 2	Dr. Afrizal, S.E., M.Si.	14-10-2021	
		NIP. 195910051988101001		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 17/11/2021
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si.
NIP. 197206071998032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan, ilmu pengetahuan serta petunjuk sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Sektor Industri Pengolahan dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat”. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program studi Strata Satu (S1) jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis memberikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Jumhur, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, perhatian dan ketelitian dalam memberikan petunjuk dan arahan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini. Menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis maka terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari bantuan, kerja sama, bimbingan dan arahan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Nurul Bariyah, SE, Phd., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Sri Kurniawati, S.E., M.Si Selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Dr. Jumhur, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan PPAPK yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si. dan Bapak Dr. Afrizal, S.E., M.Si. selaku dosen penguji terima kasih atas segala kesempatan dan perhatian serta masukan-masukan yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama Penulis menjalani masa perkuliahan.
7. Para Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan segala keperluan administrasi.
8. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan berbagai informasi, data referensi dan lain-lain.
9. Kedua Orang tua saya tercinta. Terima kasih banyak atas cinta dan kasih sayang serta doa yang terus menerus tanpa henti kalian berikan merupakan sesuatu yang sangat berharga dan memotivasi penulis dalam menempuh masa studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Badan Pusat Statistik dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data yang diperlukan serta memberikan penjelasan mengenai data-data tersebut.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Ekonomi Angkatan 2016, terimakasih atas suka cita dan bantuan yang kalian berikan selama masa kuliah, sangat bersyukur sekali mempunyai teman seperti kalian dan terimakasih kalian semua sudah memberi warna yang indah selama perkuliahan sampai sekarang ini.

Pontianak, 25 September 2021
Mahasiswa

Ismail
B1013161025

**ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE PROCESSING INDUSTRY
SECTOR AND MINIMUM WAGES ON LABOR ABSORPTION IN
DISTRICTS/CITIES OF WEST KALIMANTAN PROVINCE 2015-2019**

By: Ismail

Economics and Business Faculty

Tanjungpura University

ABSTRACT

The manufacturing sector includes all production activities aimed at improving the quality of goods and services. In general, the industry is known as the next link in the chain after agriculture, plantations and mining, it is hoped that the manufacturing sector can improve welfare by absorbing labor. Wages in the economy are the key to increasing people's income, in order to create social welfare by increasing work productivity and increasing employment in an area.

This study aims to see the influence between the manufacturing sector and district/city minimum wages in 14 districts/cities of West Kalimantan Province in 2015-2019. The data used is secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS) of West Kalimantan Province and other related agencies. The analysis used in this study uses multiple regression analysis with the Fixed Effect method, which is processed using Eviews10.

The results of the study show that the manufacturing sector has a significant effect on employment, while district/city minimum wages have no significant effect on labor absorption in 14 districts/cities of West Kalimantan Province.

Keywords: GRDP of the Processing Industry Sector, Regency/City Minimum Wage, and Labor Absorption

**ANALISIS PENGARUH SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DAN
UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015-
2019**

Oleh: Ismail

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Sektor industri pengolahan mencakup seluruh kegiatan produksi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu barang dan jasa. Pada umumnya industri dikenal sebagai mata rantai selanjutnya setelah pertanian, perkebunan dan pertambangan, diharapkan adanya sektor industri pengolahan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dengan terserapnya tenaga kerja. Upah dalam ekonomi sebagai kunci dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya produktivitas kerja serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja di suatu daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara sektor industri pengolahan dan upah minimum kabupaten/kota di 14 kabupaten /kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2019. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat serta dinas terkait lainnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan metode *Fixed Effect*, yang diolah menggunakan *Eviews10*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan upah minimum kabupaten/kota tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada di 14 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: PDRB Sektor Industri Pengolahan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Penyerapan Tenaga Kerja

RINGKASAN

ANALISIS PENGARUH SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015- 2019

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan taraf hidup suatu masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja, juga bertujuan meningkatkan pendapatan nasional. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi adalah salah satu harapan dalam pembangunan ekonomi. Besarnya sektor industri pengolahan berpengaruh dalam pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi yang baik akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam hal ini diukur dengan penyerapan tenaga kerja. Selain itu upah juga merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat. Peningkatan sektor industri pengolahan dan upah minimum kabupaten/kota adalah variabel penting dalam terciptanya lapangan kerja baru.

2. Permasalahan

- a. Apakah sektor industri pengolahan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2019?
- b. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2019?

3. Tujuan Penelitian

- a. Menguji dan menganalisis pengaruh sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2019.
- b. Menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2019.

4. Metode Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian asosiatif yaitu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dilakukan di 14 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat dengan periode observasi 2015-2019. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat dan dinas terkait. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda data panel dengan model regresi *Fixed Effect*. Data diolah dengan menggunakan *Eviews 10*.

5. Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di 14 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

6. Kesimpulan dan saran

a. Kesimpulan

Sektor industri pengolahan menunjukkan pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif. Akan tetapi upah minimum kabupaten/kota menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dan berhubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di 14 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

b. Saran

Sektor industri pengolahan ke depan perlu lebih diperhatikan terkait jenis industri pengolahan yang akan dirintis. Disisi upah minimum kabupaten/kota, pemerintah harus bisa mengoptimalkan ketetapan upah yang berlaku agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di 14 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan barat.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT	ii
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI	iii
LEMBAR YURIDIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACK	vii
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.2.1 Pernyataan Masalah	11
1.2.2 Pertanyaan Penelitian	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kontribusi Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14

2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Tenaga Kerja.....	14
2.1.2 Sektor Industri Pengolahan.....	17
2.1.3 Upah Minimum	22
2.2 Hubungan Antar Variabel	26
2.2.1 Pengaruh Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	26
2.2.2 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	26
2.3 Kajian Empiris.....	27
2.4 Kerangka Konseptual	29
2.5 Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Bentuk Penelitian	31
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3 Data	31
3.4 Variabel Penelitian	32
3.5 Metode Analisis.....	33
3.5.1 Penentuan Model Estimasi	34
3.5.2 Tahapan Analisis Data	36
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	38
3.5.4 Pengujian Signifikan	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41

4.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat.....	41
4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.3 Hasil Penelitian.....	55
4.4 Pembahasan	63
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019...	3
Tabel 1.2 Penduduk Berumur 15+ (Angkatan Kerja) menurut Jenis kegiatan (Kab/Kota) (Jiwa) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	4
Tabel 1.3 PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah)	7
Tabel 1.4 Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2019	8
Tabel 4.1 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Kalimantan Barat Tahun 2015-2019	48
Tabel 4.2 PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah)	51
Tabel 4.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	57
Tabel 4.7 Uji Chow	58
Tabel 4.8 Uji Hausman	59
Tabel 4.9 Hasil Estimasi Regresi Linier Model Fixed Effect.....	59
Tabel 4.10 Hasil Uji t Statistik	60
Tabel 4.11 Hasil Uji F Statistik	61
Tabel 4.12 Hasil Koefesien Determinasi (R^2)	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	30
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Hasil Pengujian Model dengan Menggunakan Uji Chow	74
Hasil Pengujian Model dengan Menggunakan Uji Hausman.....	75
Hasil Uji Normalitas	76
Hasil Uji Multikolinieritas.....	76
Hasil Uji Autokorelasi	77
Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	78
Hasil Estimasi Regresi Linier Model Fixed Effect	79
Data Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja, Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan dari pembangunan ekonomi bersifat multidimensional, yakni mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran, dan mampu menyelesaikan masalah ketimpangan. Salah satu ukuran keberhasilan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terdapat banyak fenomena pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah merupakan suatu perubahan pendapatan masyarakat yang meningkat yang bersifat secara menyeluruh. Pemerintah daerah dan masyarakatnya membentuk pola kerjasama untuk mengelola sumber daya alam yang ada untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus merangsang kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Suatu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat inflasi yang rendah serta tingkat pengangguran yang rendah dapat dipastikan bahwa daerah tersebut memiliki perkembangan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Indonesia sendiri memiliki tujuan yang ingin dicapai secara makro ekonomi, seperti stabilitas perekonomian, penyediaan kesempatan kerja penuh serta inflasi yang rendah, tingkat pengangguran rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Negara-negara yang sedang berkembang umumnya dihadapkan dengan persoalan permasalahan yang unik dari kombinasi permasalahan pergerakan penduduk dari desa ke kota dalam jumlah besar, stagnannya produktivitas pertanian dan meningkatnya pengangguran di daerah perkotaan dan pedesaan (Kuncoro, 1997).

Konsep pembangunan sering dikaitkan dengan adanya perubahan dalam struktur perekonomian, yakni dari struktur pertanian menuju struktur industri. Potensi ekonomi yang ada di suatu daerah seperti Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia menjadi tolak ukur daerah tersebut dalam memberikan kontribusi

terhadap pembangunan ekonomi. Adapun sumber daya alam meliputi sektor pertanian, sektor perikanan atau kelautan, sektor pertambangan dan sektor yang lainnya. Sedangkan potensi sumber daya manusia tidak hanya dihitung dalam jumlah penduduk dan juga jumlah pekerja, tetapi juga meliputi kualitas yang dimiliki oleh penduduk tersebut.

Dalam tujuan pembangunannya, Negara Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya ialah masalah kependudukan, ketenagakerjaan dan meningkatnya jumlah pengangguran. Permasalahan kependudukan yang dihadapi negara Indonesia adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang tinggi namun tingkat persebarannya tidak merata. “Kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan nasional. Peran kependudukan dalam pembangunan nasional salah satunya adalah sebagai sumber modal (Sukirno, 2013).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya namun pertumbuhan tersebut diikuti dengan permasalahan pengangguran terbuka. Maka dari itu permasalahan pengangguran terbuka harus segera diselesaikan agar pertumbuhan ekonomi bisa tercapai dengan maksimal karena pengangguran terbuka merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi jalannya perekonomian Indonesia (Kristyana, 2011).

Laju pertumbuhan yang cukup tinggi menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang besar sehingga menyebabkan jumlah tenaga kerja yang terus bertambah, sementara disisi lain penciptaan kesempatan kerja relatif terbatas. Hal ini yang menyebabkan pengangguran semakin bertambah. Dewasa ini, pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang terus dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Purwasih, 2017).

Penduduk merupakan salah satu potensi yang dapat dikerahkan sebagai modal dalam usaha pembangunan. Dimensi masalah ketenagakerjaan memiliki penyebab yang berbeda, sehingga jauh daripada hal itu masalah ketenagakerjaan tidak hanya masalah keterbatasan lapangan kerja serta rendahnya produktivitas penduduk. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu dari 34 propinsi yang ada di Indonesia. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk provinsi terbesar keempat di Indonesia. Provinsi terbesar pertama adalah Provinsi Papua (319.036 km²), kemudian Provinsi Kalimantan Tengah (153.564 km²). Provinsi Kalimantan Barat memiliki jumlah angkatan kerja yang cukup tinggi. Data jumlah angkatan kerja Propinsi Kalimantan Barat dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

No	Tahun	Angkatan Kerja (Jiwa)	Pertumbuhan (%)	Bekerja (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
1	2015	2.357.224	1,6	2.235.887	0,4
2	2016	2.388.758	1,3	2.287.823	2,3
3	2017	2.408.259	0,8	2.303.198	0,6
4	2018	2.451.399	1,8	2.346.881	1,9
5	2019	2.479.287	1,1	2.369.015	0,9

Sumber: BPS Kalimantan Barat

Dari Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja tentu akan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto di Propinsi Kalimantan Barat. PDRB merupakan nilai tambah bruto dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu wilayah domestik, yang timbul akibat dari segala aktivitas ekonomi selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Tinggi rendahnya PDRB di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut.

Namun tingkat pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan angkatan yang bekerja masih berfluktuatif. Terlihat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 angka pertumbuhannya masih sangat bervariasi.

Tabel 1.2
Penduduk Berumur 15+ (Angkatan Kerja) menurut Jenis kegiatan
(Kab/Kota) (Jiwa) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Bekerja (jiwa)	Pengangguran (jiwa)	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)
1	Kalimantan Barat	2.369.015	110.272	2.479.287
2	Sambas	259.273	9.640	268.913
3	Bengkayang	125.863	3.506	129.369
4	Landak	175.916	4.977	180.893
5	Mempawah	112.154	6.141	118.295
6	Sanggau	228.488	7.244	235.732
7	Ketapang	228.921	10.885	239.776
8	Sintang	205.130	6.782	211.912
9	Kapuas Hulu	142.707	3.602	146.309
10	Sekadau	108.270	3.506	111.776
11	Melawi	108.663	2.731	111.394
12	Kayong Utara	50.031	2.083	52.114
13	Kubu Raya	251.770	15.006	266.776
14	Kota Pontianak	271.754	27.311	299.065
15	Kota Singkawang	100.075	6.888	106.963

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.2 menggambarkan keadaan kependudukan yang ada di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, terlihat bahwa jumlah angkatan kerja yang jumlahnya paling banyak berada di Kota Pontianak sebanyak 271.754 jiwa. Padahal jika kita lihat dari segi luas wilayah, tentu masih banyak daerah lain yang lebih luas dibandingkan Kota Pontianak. Hal ini terjadi disebabkan wilayah Kota Pontianak yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, sehingga

segala aktivitas ekonomi terpusat di wilayah tersebut. Termasuk salah satunya sektor industri yang mampu memberikan peluang penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Sehingga cukup banyak masyarakat yang beralih sementara untuk mencari pekerjaan di Kota Pontianak yang menyebabkan jumlah angkatan kerja di Kota Pontianak meningkat, efek samping dari hal ini adalah terjadinya jumlah pengangguran yang cukup tinggi pula di Kota Pontianak sebanyak 27.311 jiwa dan merupakan angka pengangguran tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019. Selain itu, Kabupaten Kubu Raya menempati angka pengangguran tertinggi kedua setelah Kota Pontianak sebanyak 15.006 jiwa. Ini merupakan imbas dari wilayah Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak. Tak hanya itu, jika diperhatikan tingkat penyerapan tenaga kerja di tiap kabupaten/kota masih banyak terdapat kesenjangan antara daerah yang satu dengan yang lain.

Maka dari itu, pemerintah perlu menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut, yaitu berupa adanya solusi penyerapan tenaga kerja untuk menyerap jumlah angkatan kerja agar setiap tahun terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di suatu daerah.

Faktor pertama yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja adalah investasi. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000). Investasi dapat diartikan sebagai pengorbanan peluang konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Priyo Prasajo, 2009). Pemikiran yang sama juga dikemukakan oleh Harrod-Domar (Mulyadi, 2000), hubungan antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja adalah investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi.

Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi, otomatis penggunaannya akan ditingkatkan.

Faktor kedua adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi (Daroedono, 2004). Dalam hal ini Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana serta prasarana umum yang dapat digunakan masyarakat luas. Lebih jauh lagi, dalam ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan bentuk dari modal publik (*public capital*) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja (Haris, 2005). Secara umum sarana adalah fasilitas publik misalnya seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, jaringan telepon, dan lain-lain. Selain itu, infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik, termasuk kerangka kerja organisasional, ilmu pengetahuan, serta teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat serta pembangunan ekonomi mereka.

Selanjutnya sektor industri pengolahan. Industri mempunyai peranan sebagai (leading sector) artinya sektor pemimpin (Arsyad, 2010). Dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu atau membangkitkan pembangunan sektor-sektor yang lain. Sebagai contoh, pertumbuhan sektor industri yang pesat akan mampu merangsang pertumbuhan sektor pertanian yang menyediakan bahan baku bagi suatu industri. Industri tersebut juga memungkinkan untuk mengembangkan sektor jasa, seperti berdirinya sebuah lembaga-lembaga keuangan, lembaga pemasaran atau periklanan yang kesemuanya itu akan mendukung lajunya pertumbuhan industri. Menurut Kuncoro (2007), industrialisasi dianggap sebagai resep meningkatkan aktivitas ekonomi, produktivitas, dan peningkatan standar hidup. Berbagai peran industri

tersebut akan dapat meningkatkan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi sekaligus memperluas lapangan kerja.

Sektor industri memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara. Sektor industri mampu memegang peran kunci sebagai penggerak pembangunan sebab sektor industri mempunyai kelebihan dibandingkan sektor yang lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar. Kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga mampu menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah (Muhtamil, 2017).

Tabel 1.3
PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Barat Atas
Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah)

NO	KABUPATEN / KOTA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Sambas	1823.32	1998.95	2210.25	2295.79	2427.84
2	Kabupaten Bengkayang	608.05	665.95	737.37	802.97	874.99
3	Kabupaten Landak	879.58	941.69	1031.60	1117.62	1189.42
4	Kabupaten Mempawah	905.41	994.35	1104.36	1219.34	1326.39
5	Kabupaten Sanggau	2740.99	3029.2	3271.88	3358.16	3432.09
6	Kabupaten Ketapang	2433.80	2749.74	3169.86	3630.02	3968.70
7	Kabupaten Sintang	986.96	1037.24	1123.24	1208.97	1313.75
8	Kabupaten Kapuas Hulu	772.74	865.51	966.52	1062.3	1163.68
9	Kabupaten Sekadau	247.47	274.06	303.59	336.75	366.82
10	Kabupaten Melawi	185.15	196.06	207.40	216.46	227.21
11	Kabupaten Kayong Utara	265.80	302.44	341.91	372.27	401.51
12	Kabupaten Kubu Raya	6069.51	6729.86	7502.88	8355.42	9430.66
13	Kota Pontianak	4547.14	5024.68	5552.27	6044.87	6780.09
14	Kota Singkawang	1008.16	1143.36	1271.47	1365.73	1458.24

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari Tabel 1.3 dapat kita lihat bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan, namun dilihat secara rinci tidak semua Kabupaten/Kota memiliki tingkat kontribusi yang tinggi. Dengan kata lain hubungan antara sektor

industri dan penyerapan tenaga kerja sangat erat. Semakin meningkat kontribusi sektor industri pengolahan, maka semakin meningkat pula jumlah penyerapan tenaga kerja.

Dalam Tabel 1.3 terlihat bahwa PDRB sektor industri tertinggi terletak di Kabupaten Kubu Raya. Diurutan kedua adalah Kota Pontianak dan yang ketiga adalah Kabupaten Sanggau.

Secara umum, pertumbuhan unit usaha pada suatu sektor produksi pada suatu wilayah akan menambah jumlah tenaga kerja. Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah tenaga kerja. Artinya jika jumlah unit usaha bertambah maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh unit usaha yang bersangkutan akan bertambah pula (Squire, 1992).

Upah juga memainkan peranan yang penting dalam ketenagakerjaan. Upah adalah salah satu faktor yang jika dilihat dari sisi penawaran ketenagakerjaan mampu berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut pemikiran Todaro (2000, terjemahan Haris Munandar, 2000), semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan kepada tenaga kerja hal ini akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Pemikiran yang sama dikemukakan oleh Sumarsono (2003), besar kecilnya upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Biaya produksi yang tinggi meningkatkan harga produk yang pada akhirnya membuat permintaan terhadap produk berkurang. Kondisi ini memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi permintaan tenaga kerja. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat upah mempunyai hubungan yang negatif dengan tenaga kerja.

Tabel 1.4

Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2019

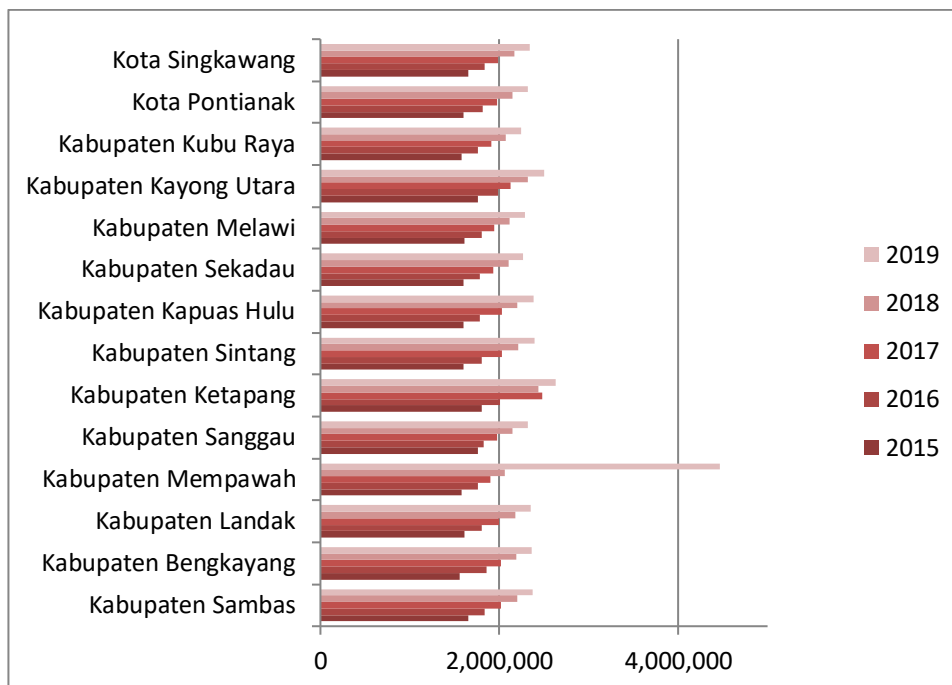
No	Tahun	Upah Minimum Provinsi (Rp)
1	2014	1.380.000
2	2015	1.560.000
3	2016	1.739.400
4	2017	1.882.900
5	2018	2.046.900

6	2019	2.211.500
---	------	-----------

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalbar

Dari Tabel 1.4 terlihat bahwa upah minimum Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Tertinggi pada tahun 2018 pemerintah provinsi menetapkan standar upah minimum di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 2.046.900.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota masing-masing memiliki standar upah minimum tersendiri. Hal ini dapat kita lihat dalam gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1

Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

Dari gambar 1.1 memperlihatkan kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang merupakan daerah dengan upah minimum tertinggi di tahun 2017 senilai Rp 2.478.000. Tidak hanya di tahun 2017, pada tahun 2016 Kabupaten Ketapang juga menempati upah tertinggi dengan nilai Rp 2.007.000,

begitu pula di tahun 2015 upah minimum di Kabupaten Ketapang senilai Rp 1.800.000. Dari tahun 2015 hingga 2017 upah minimum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selalu mengalami kenaikan. Sedangkan ditahun 2016 hingga tahun 2018 Kabupaten Ketapang masih memimpin dengan menetapkan upah minimum kabupaten/kota yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 2.007.000 kemudian ditahun 2017 sebesar Rp 2.478.000 dan pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Ketapang menetapkan upah minimum kabupaten/kota sebesar Rp 2.439.300, namun pada tahun 2019 upah minimum kabupaten ketapang menempati urutan kedua setelah Kabupaten Mempawah yaitu sebesar Rp 2.636.000. Untuk Kabupaten Mempawah sendiri pemerintah menetapkan upah minimum kabupaten/kota sebesar Rp 4.465.200 kemudian diurutan ketiga ditempati oleh Kabupaten Kayong Utara yaitu sebesar Rp 2.501.850. Jika dilihat dari besaran kenaikan angka tersebut Kabupaten Mempawah terlihat sangat menonjol dibandingkan dengan Kabupaten yang lain.

Dalam suatu sistem pasar bebas dibutuhkan usaha serta kebijakan untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi. Keynes berpendapat bahwa fenomena yang sering dihadapi oleh perekonomian salah satunya ialah pengangguran. Namun untuk mengatasi fenomena tersebut dibutuhkan juga campur tangan yang aktif dalam perekonomian baik dari masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah. Permintaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat upah. Adanya perbedaan pemahaman dan kepentingan antara para pelaku usaha dan para buruh/pekerja menyebabkan timbulnya permasalahan yang selama ini terjadi dalam permintaan tenaga kerja. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang upah minimum.

Pada dasarnya kebijakan upah minimum yang telah diterapkan di beberapa negara bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Upah juga memiliki dampak terhadap jumlah kesempatan kerja dan tingkat pengangguran. Adanya

kebijakan penerapan upah minimum di tiap Kabupaten /Kota yang biasa disebut UMK, justru akan mengurangi dampak permintaan angkatan kerja. Di Indonesia sendiri sistem pengupahan diatur dalam Undang-undang NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Standar kelayakan hidup merupakan salah satu indikator yang dipakai pemerintah dalam menentukan kebijakan pengupahan dan menetapkan upah minimum. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mampu menciptakan lapangan kerja dengan tingkat upah yang layak (Sulistiawati, 2012).

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penelitian dilakukan untuk mengukur dan menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, dalam hal ini berupa pengaruh sektor industri dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja. Sehingga judul dari penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Sektor Industri Pengolahan dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu jumlah kuantitas tertentu dari tenaga kerja yang digunakan oleh suatu sektor atau unit usaha. Di Provinsi Kalimantan Barat jumlah penyerapan tenaga kerja pada tahun 2015-2019 cenderung fluktuatif, tetapi dalam kurun waktu dua tahun yaitu tahun 2016 dan 2018 penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan. Namun masih terdapat kesenjangan masalah ketenagakerjaan antara daerah yang satu dengan yang lain. Diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi masalah tersebut, diantaranya sektor industri pengolahan serta upah minimum. Terlihat bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Kalimantan Barat menurun dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 pertumbuhan sektor industri pengolahan hanya mencapai 2,75%. Selain itu, kontribusi PDRB sektor industri di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan

Barat masih kurang merata. Masih banyak kesenjangan yang terjadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Sedangkan untuk upah minimum kabupaten/kota selalu mengalami kenaikan setiap tahun yang diduga memiliki pengaruh terhadap perubahan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Barat.

. Sehingga diketahui dari latar belakang yang dipaparkan, perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh sektor industri pengolahan dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah sektor industri pengolahan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2019?
- b. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menguji dan menganalisis pengaruh sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2019.
- b. Menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2019.

1.4 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kontribusi Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai potensi pengembangan sektor industri serta kebijakan penentuan upah minimum dalam penyerapan tenaga kerja.

b. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu ekonomi di setiap Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah terhadap kehidupan masyarakat atau organisasi.